

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya melalui penerapan prinsip *Value for Money* (VfM). Dalam pengadaan kendaraan roda dua oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025, pengadaan bernilai Rp2,44 triliun dilaksanakan melalui mekanisme *E-Purchasing* tanpa Mini-Kompetisi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai optimalisasi persaingan dan penerapan prinsip VfM dalam pengadaan bernilai besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip VfM dalam mekanisme *E-Purchasing* pada pengadaan kendaraan roda dua BGN Tahun 2025 serta merumuskan pengaturan ideal terhadap *E-Purchasing* bernilai besar. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi agar mekanisme pengadaan bernilai besar tetap menjamin persaingan dan optimalisasi hasil pengadaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kesesuaian mekanisme *E-Purchasing* dengan prinsip VfM serta mengidentifikasi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan mengenai kewajiban kompetisi dalam pengadaan bernilai besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip VfM dalam pengadaan kendaraan roda dua BGN Tahun 2025 terindikasi belum terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan pengadaan melalui *E-Purchasing* tanpa Mini-Kompetisi menyebabkan tidak terdapat tahapan kompetisi antarpelaku usaha untuk membandingkan alternatif penawaran secara optimal, sehingga berkontribusi terhadap belum optimalnya pemenuhan prinsip VfM. Penelitian juga menemukan adanya *partial legal gap* dalam pengaturan *E-Purchasing* bernilai besar, khususnya belum adanya kewajiban kompetisi berdasarkan ambang nilai tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma imperatif pada tingkat Peraturan Presiden, penetapan ambang nilai, perluasan kewajiban kompetisi lintas sektor, serta pengaturan sanksi administratif.

Kata Kunci: *Value for Money*; *E-Purchasing*; Mini-Kompetisi; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.